

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang**

Pembangunan merupakan proses yang menurut waktu adalah proses transformasi dari suatu “*breakthrough*” keadaan ekonomi yang berhenti (*stagnan*), sehingga mengakibatkan pertumbuhan yang terus menerus secara kumulatif (Nitisastro, 2010). Pembangunan dalam suatu negara dapat diarahkan menjadi tiga hal yaitu dapat meningkatkan distribusi kebutuhan pokok dan ketersediaan bagi masyarakat, serta meningkatkan standar hidup masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya dapat meningkat secara baik (Todaro, 2004).

Dengan berjalannya pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dengan cara menggunakan potensi atau sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Potensi tersebut dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber daya buatan (infrastruktur, sarana prasarana atau lain-lain). Apabila sumber daya yang dikelola dapat dimanfaatkan dengan baik maka akan menentukan tingkat keberhasilan suatu pembangunan. Selain itu, pembangunan juga memiliki tujuan untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Dalam kesempatan ini pemerintah pusat melalui programnya, setiap tahunnya memberikan anggaran berupa dana desa mencapai 1 milyar rupiah perdesa sesuai dengan luas dan jumlah penduduk di wilayah desa masing-masing. Hal

tersebut merupakan salah satu misi dari pemerintah dalam membangun daerah pedesaan yaitu dengan melalui pemberdayaan masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas berupa keanekaragaman usaha pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, serta mengoptimalkan sumberdaya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Dengan adanya program dari pemerintah pusat diharapkan pemerintah desa mampu mengoptimalkan segala potensi yang ada di wilayahnya masing-masing sehingga akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan yang ada dapat disimpulkan tujuan pembangunan pedesaan adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional maupun nasional. Sehingga, masyarakat dapat diberdayakan dalam pembangunan pedesaan dengan mendorong, membangkitkan kesadaran, dan memotivasi akan adanya potensi yang dimilikinya serta terus berupaya untuk mengembangkannya. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu untuk meningkatkan taraf hidup agar lebih layak serta kemajuan dalam bidang ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi dan kondisi pasar.

Agar rakyat pedesaan dapat memahami dan mengembangkan potensi, perlu adanya pengetahuan yang baik sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, hal tersebut juga dapat dilakukan dengan adanya keinginan dalam pemerataan akan sumber daya alam dan kebijakan yang sesuai. Salah

satu yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didirikan dengan tujuan sebagai penguat atau penopang ekonomi desa. Dengan berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pemerintah desa diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tanpa harus bergantung dengan aliran dana yang bersumber dari pemerintah pusat, dengan kata lain pemerintah desa mampu mandiri.

Pendirian BUMDes sendiri dilandasi oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 5234). Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438).

Potensi yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Adapun masing-masing

pemerintah desa diberi kebebasan dalam membuat peraturan berkaitan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang meliputi anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dalam pengelolaannya. Hal tersebut didasari dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 mengatur tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara nomor 4587).

Selain itu, ada beberapa aturan yang mengatur tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39 Tahun 2010 mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316). Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 6 Tahun 2007 juga menjelaskan tentang bagaimana Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara nomor 6 Tahun 2007). Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 15 juga mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 15).

Peraturan Bupati (Perbup) Jepara nomor 3 Tahun 2013 mengatur tentang bagaimana Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2013) Salah satu yang dapat kita lihat adalah dibuatnya Peraturan Petinggi (Perpet) dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nomor 02 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegal Makmur Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Dengan adanya peraturan yang jelas, pemerintah desa juga diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan perekonomian secara sehat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun anggotanya, atau turut serta dalam membangun sistem perekonomian nasional yang menjadi salah satu program pemerintah. Sebagai Lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi, perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak mungkin dapat dilepaskan dari kondisi persaingan yang akan dihadapinya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Lembaga desa diharapkan mampu meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang ada, adapun pengelolaannya sepenuhnya akan dilaksanakan oleh masyarakat desa sendiri yaitu dengan sistem dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Serta cara kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menampung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan maupun badan usaha yang telah dikelola secara profesional namun tidak menghilangkan potensi khas yang dimiliki desa. Usaha masyarakat dalam mengelola program ini diharapkan dapat lebih produktif dan efektif sehingga kedepannya diharapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu menjadi lembaga yang benar-benar menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang telah berkembang sesuai dengan potensi desa atau ciri khas desa masing-masing yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan potensi desa masing-masing. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap daerah berbeda-beda potensinya, sehingga jenis usahanya pun berbeda dari mulai jenis usaha bahan sembako seperti toko kelontong, mini market desa, sewa alat-alat proyek bangunan hingga jenis usaha seperti jasa-jasa lain termasuk desa wisata. Adapun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegal Makmur yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Tegalsambi ini bergerak dalam bidang, Perdagangan, Pertanian, Unit Simpan Pinjam dan Mengelola Pasar Desa.

Meski dalam jumlah yang belum banyak keberadaan BUMDes juga diharapkan mampu memberikan andil dalam peningkatan sumber pendapatan asli desa yang nantinya memungkinkan desa untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat secara mandiri dan optimal, hal tersebut tentunya dikelola dengan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai perwujudan Good Governance, penelitian ini akan menyajikan bagaimana pengaruh Peranan Informasi Akuntansi, Sistem Manajemen dan Transparansi Pengelolaan Dana Bumdes pada Pemerintah Desa Tegalsambi. Sehingga, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) benar-benar mampu membantu perwujudan Good Governance di Pemerintah Desa Tegalsambi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu menjadi landasan

bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baik dan benar sehingga kecenderungan untuk bergantung pada aliran dana Pemerintah Pusat dapat berkurang dan menjadikan desa-desa yang ada, khususnya di wilayah Kabupaten Jepara menjadi lebih mandiri.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegal Makmur Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan memiliki potensi dalam bidang perdagangan, pertanian, unit simpan pinjam, dan pengelolaan pasar. Semua upaya yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegal Makmur Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan ini untuk mengembangkan semua potensi yang ada, agar nantinya dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Tegalsambi. Pada dasarnya keberadaan PAD sangat berperan dalam pembiayaan pembangunan daerah serta infrastruktur lainnya, selain itu diharapkan masyarakat juga dapat merasakan hasil dari kinerja pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa Tegalsambi, khususnya kesejahteraan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan pendapatan.

Dengan adanya penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana pengaruh Peranan Informasi Akuntansi, Sistem Manajemen dan Transparansi Pengelolaan Dana mampu menjadi pilar penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegal Makmur Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan. Sehingga, keberadaan lembaga tersebut mampu membantu mewujudkan Good Governance di Pemerintah Desa Tegalsambi. Dalam hal ini, akan diteliti bagaimana penyampaian Informasi tersebut bisa diterima

semua pihak yang terkait. Sistem Manajemen dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan. Serta, pengelolaan dana berjalan sesuai aturan, sehingga transparansi dapat terwujud.

Secara umum, penelitian ini akan menampilkan program dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara umum, adapun yang menjadi pembeda adalah penelitian ini menyajikan bagaimana tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sehingga dari ketiga aspek variabel yang telah dipilih memang benar-benar berpengaruh kepada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tegalsambi Kecamatan Tahun khususnya pada tahun 2018.

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana Peranan Informasi Akuntansi, Sistem Manajemen Dan Transparansi Pengelolaan Dana dalam meningkatkan Good Governance Pemerintah Desa. Objek penelitiannya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegal Makmur yang secara khusus berada di Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dengan penelitian yang dilakukan adalah data yang diperoleh dari pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2018, sebagai acuan dan dasar dalam menyusun penelitian ini.

### **Perumusan Masalah**

Masalah pokok yang akan diuji dalam penelitian ini dirumuskan dengan pertanyaan riset adalah :

1. Bagaimana pengaruh Peranan Informasi Akuntansi terhadap Good Governance di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegal Makmur Desa Tegalsambi ?
2. Bagaimana pengaruh Sistem Manajemen terhadap Good Governance di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegal Makmur Desa Tegalsambi ?
3. Bagaimana pengaruh Transparansi Dana terhadap Good Governance di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegal Makmur Desa Tegalsambi ?
4. Bagaimana pengaruh Informasi, Sistem Manajemen dan Transparansi Pengelolaan Dana secara bersama-sama dalam mewujudkan Good Governance?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Peranan Informasi Akuntansi terhadap Good Governance di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegal Makmur Desa Tegalsambi.
2. Menganalisis pengaruh Sistem Manajemen terhadap Good Governance di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegal Makmur Desa Tegalsambi.
3. Menganalisis pengaruh Transparansi Dana terhadap Good Governance di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegal Makmur Desa Tegalsambi.
4. Menganalisis pengaruh Peranan Informasi Akuntansi, Sistem Manajemen dan Transparansi Dana secara bersama-sama terhadap Good Governance di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegal Makmur Desa Tegalsambi.

## **Manfaat penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Teoritis

Sebagai bahan acuan bagi desa lain khususnya yang ada di Kabupaten Jepara dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga, ada motivasi dimasing-masing desa untuk mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan baik, yang pada akhirnya dapat membantu Pemerintah Desa untuk mewujudkan Good Governance di wilayahnya masing-masing sesuai visi dan misi dari Kepala Desa.

### 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bukti secara empiris dan bermanfaat untuk pengembangan disiplin pada ilmu akuntansi, khususnya konsentrasi bidang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan pengaruh Peranan Informasi Akuntansi, Sistem Manajemen dan Transparansi Dana terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegal Makmur yang berada di Desa Tegalsambi dalam mewujudkan Good Governance.